

SKRIPSI
PENERAPAN PRINSIP *BUSINESS JUDGMENT RULE*
TERHADAP BUMN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI
INDONESIA

*Diajukan Untuk Memenuhi Prasyarat Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Di Fakultas Hukum Universitas Andalas*

DISUSUN OLEH :

ADRIAN DENAR WIDJAKSONO

2210113047
Program Kekhususan : Hukum Pidana (PK IV)



Pembimbing :

Dr. NANI MULYATI, SH., M.CL

Dr. EDITA ELDA, S.H., M.H

PROGRAM SARJANA ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2026

No. Reg: 39/PK-IV/IV/2026

LEMBAR PENGESAHAN
VALIDITY SHEET
No. Reg: 39/PK-IV/IV/2026

PENERAPAN PRINSIP *BUSINESS JUDGMENT RULE* TERHADAP BUMN
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

*THE APPLICATION OF THE BUSINESS JUDGMENT RULE TO BUMN IN
CORRUPTION CASES IN INDONESIA*

Disusun Oleh:

Author

Adrian Denar Widjaksono
2210113047

Program Kekhususan (PK): Hukum Pidana (PK IV)
Concentration Program (CP): Criminal Law (CP IV)

Skripsi ini Telah Dipertahankan dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 10
Agustus 2026 dan Dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji yang Terdiri Dari:
*This Minor Thesis was Defended in the Comprehensive Examination Session on
August 10th, 2026 and Approved by a Team of Examiners Consisting of*

Dekan
Dean



Prof. Dr. Ferdi, S.H., M.Hum.
NIP. 196807231993021001
Pembimbing I
Supervisor I

Wakil Dekan I
Vice Dean I



Dr. Nani Mulyati, S.H., MCL.
NIP. 198208092005012002
Pembimbing II
Supervisor II



Dr. Nani Mulyati, S.H., MCL.
NIP. 198208092005012002
Penguji I
Examiner I



Dr. Edita Elida, S.H., M.H.
NIP. 198601252009122004
Penguji II
Examiner II



Prof. Dr. Aria Zurnetti, S.H., M.Hum.
NIP. 196212051987022001



Riki Afrizal, S.H., M.H.
NIP. 198509162014041001

	No. Alumni Universitas	Adrian Denar Widjaksana	No. Alumni Fakultas
	a. Tempat/Tgl Lahir: Padang/ 06 Juli 2004 b. Nama Orangtua : c. Fakultas : Hukum d. PK : Hukum Pidana e. No. BP : 2210113047	f. Tanggal Lulus : 10 Agustus 2026 g. Predikat Lulus : Dengan Pujian h. Lama Studi : 4 Tahun i. IPK : 3.89 j. Alamat : Jln. Kampung Nias VII, No. 6	

PENERAPAN PRINSIP *BUSINESS JUDGMENT RULE* TERHADAP BUMN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

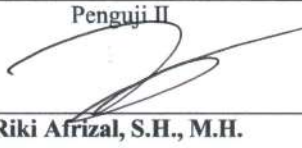
(Adrian Denar Widjaksana, 2210113047, Fak. Hukum Universitas Andalas, 170 Hlm, 2026)

ABSTRAK

Prinsip *Business Judgment Rule* (BJR) merupakan suatu aturan atau prinsip khusus yang melindungi pertimbangan atau keputusan bisnis yang diambil oleh organ perusahaan. Prinsip BJR yang diatur dalam UU BUMN melindungi organ BUMN yang melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian, Kerugian bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, tidak memiliki benturan kepentingan, serta tidak memperoleh keuntungan pribadi secara tidak sah. Namun demikian, penerapan prinsip BJR dalam hukum tindak pidana korupsi masih memperlihatkan ketimpangan antara norma dan praktik. Oleh karena itu perlu kajian lebih lanjut dengan rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimanakah penerapan prinsip *Business Judgment Rule* dalam BUMN dikaitkan dengan pertanggungjawaban pidana; 2. Bagaimanakah penerapan prinsip *Business Judgment Rule* terhadap pertanggungjawaban BUMN dalam perkara tindak pidana korupsi; 3. Bagaimanakah kendala dan upaya penerapan prinsip *Business Judgment Rule* terhadap pertanggungjawaban BUMN dalam tindak pidana korupsi. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan mengacu pada pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data yang digunakan terhadap penelitian ini adalah data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier serta data primer sebagai data pendukung. Hasil penelitian yang diperoleh yakni: 1. Penerapan prinsip BJR dalam BUMN dikaitkan dengan pertanggungjawaban pidana menunjukkan pemidanaan hanya dapat dilakukan apabila terpenuhi unsur tindak pidana dan unsur kesalahan berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) sebagaimana tercermin dalam asas *geen straf zonder schuld*; 2. Pertanggungjawaban BUMN dalam perkara tindak pidana korupsi menunjukkan bahwa penerapan prinsip BJR pada dasarnya dikenakan kepada direksi sebagai subjek hukum orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) yang menjalankan fungsi pengurusan dan pengambilan keputusan atas nama BUMN; 3. Kendala penerapan prinsip BJR terhadap pertanggungjawaban BUMN dalam tindak pidana korupsi meliputi ketidakpastian hukum terkait penafsiran kerugian BUMN, kompleksitas pembuktian unsur BJR, serta budaya kriminalisasi risiko bisnis yang disertai lemahnya dokumentasi korporasi. Untuk mengatasinya, diperlukan penyamaan persepsi antar penegak hukum. Selain itu, penguatan tata kelola perusahaan dan sistem dokumentasi keputusan bisnis perlu dilakukan guna mendukung pembuktian penerapan prinsip tersebut.

Kata Kunci: *Business Judgment Rule*, BUMN, Tindak Pidana Korupsi.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan lulus pada 10 Agustus 2026. Penguji,

Tanda Tangan	Penguji I	Penguji II
		
Adrian Denar Widjaksana	Prof. Dr. Aria Zurnetti, S.H., M.Hum	Riki Afrizal, S.H., M.H.

Mengetahui,

Ketua Departemen Hukum Pidana: **Riki Afrizal, S.H., M.H.**


Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

	Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas :	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas:	Nama:	Tanda Tangan:

	Alumni University Number	Adrian Denar Widjaksono	Alumni University Number
	a. Place/Date of Birth : Padang/06 th July 2004 b. Parents' Name : c. Faculty : Law d. Concentration : Criminal Law e. Student ID : 2210113047	f. Graduation Date : 10 th August 2026 g. Pass Predicate : Cumlaude h. Length of Study : 4 Years i. GPA : 3,89 k. Address : Jln. Kampung Nias VII, No. 6	

THE APPLICATION OF THE BUSINESS JUDGMENT RULE TO-BUMN IN CORRUPTION CASES IN INDONESIA

(Adrian Denar Widjaksono, 2210113047 Faculty of Law, Andalas University, 170 Pages, 2026)

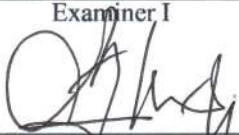
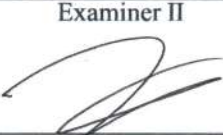
ABSTRACT

The Business Judgment Rule (BJR) is a specific rule or principle that protects business considerations or decisions made by corporate organs. The BJR principle, as regulated in the BUMN Law, protects BUMN organs that carry out management in good faith and with due diligence, where losses are not caused by their fault or negligence, they have no conflict of interest, and they do not unlawfully obtain personal gain. However, the application of the BJR in corruption criminal law still shows a disparity between norms and practice. Therefore, further study is required with the following problem formulations: 1. How is the BJR principle applied in BUMN in relation to criminal liability? 2. How is the BJR principle applied to BUMN's liability in corruption cases? 3. What are the obstacles and efforts in applying the BJR principle to BUMN's liability in corruption cases?. The method used in this research is normative juridical, referring to the statute approach, case approach, and conceptual approach. The data used is secondary data with primary, secondary, and tertiary legal materials, as well as primary data as supporting data. The results obtained are: 1. The application of the BJR in BUMN in relation to criminal liability shows that punishment can only be imposed if the elements of a criminal act and the element of fault in the form of intent (dolus) or negligence (culpa) are fulfilled, as reflected in the principle of geen straf zonder schuld; 2. BUMN's liability in corruption cases shows that the application of the BJR is essentially imposed on the directors as natural persons (natuurlijke persoon) who carry out management and decision-making functions on behalf of BUMN; 3. Obstacles to the application of the BJR to BUMN's liability in corruption cases include legal uncertainty regarding the interpretation of BUMN losses, the complexity of proving the elements of the BJR, and a culture of criminalizing business risk accompanied by weak corporate documentation. To overcome this, it is necessary to equalize perceptions among law enforcement officials. In addition, strengthening corporate governance and business decision documentation systems needs to be carried out to support the evidentiary process of the application of this principle.

Keywords: *Business Judgment Rule, BUMN, Criminal Acts of Corruption.*

This minor thesis has defended in front of the examiner team at August 10th, 2026.

Examiner,

Signature	Examiner I	Examiner II
		
Adrian Denar Widjaksono	Prof. Dr. Aria Zurnetti, S.H., M.Hum	Riki Affrizal, S.H., M.H.

Acquainted,

Head of the Department of State Criminal Law: **Riki Afrizal, S.H., M.H.**


Signature

Alumni has been registered in the faculty/university under the number:

	Faculty/University Officer	
No. Alumni Faculty:	Name:	Signature:
No. Alumni University:	Name:	Signature: